



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) TAHUN 2016-2021**

**DINAS PERIKANAN**

**TAHUN 2017**



## **KATA PENGANTAR**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih, berwibawa dan akuntabel serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Jember, maka harus secara konsisten melaksanakan tujuan dan sasarannya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pengawal perencanaan pembangunan dalam pelaksanaan pemerintahan oleh karenanya perlu menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) DISPERIKAN Kabupaten Jember sebagai wujud implementasi dalam perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kewenangan DISPERIKAN Kabupaten Jember yang baru.

Penyusunan Dokumen Rancangan Perubahan Renstra DISPERIKAN Kabupaten Jember ini diharapkan akan memberikan manfaat, terutama sebagai bahan penyusunan Renja DISPERIKAN pada setiap tahunnya.

Jember, Desember 2017

Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN JEMBER

**ROKHMATULLAH HADI WITONO, SP**

Penata Tingkat I

NIP. 19731023 199803 1 003



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. LANDASAN HUKUM .....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD.....</b>	<b>7</b>
2.1. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DISPERIKAN KABUPATEN JEMBER.....	8
2.2. STRUKTUR ORGANISASI DISPERIKAN KABUPATEN JEMBER	17
2.3. SUMBERDAYA DISPERIKAN KABUPATEN JEMBER .....	20
2.4. KINERJA PELAYANAN DISPERIKAN KABUPATEN JEMBER .....	22
2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DISPERIKAN KABUPATEN JEMBER.....	23
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....</b>	<b>25</b>
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DISPERIKAN KABUPATEN JEMBER .....	25
3.2. TELAHAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKILKEPALA DAERAH TERPILIH .....	25
3.3. TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI DAN RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR.....	34
3.4. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS .....	35
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....	38



BAB	IV	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	40
BAB	V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	41
BAB	VI	INDIKATOR KINERJA BAPPEDA KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	42
BAB	VII	PENUTUP .....	43
LAMPIRAN			



## **BAB I      PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan dan penetapannya perubahan Renstra OPD tetap berpedoman pada aturan yang sama dengan penyusunan Renstra OPD dalam kaitannya dengan Perubahan yang dilakukan juga kepada RPJMD yaitu sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Renstra OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra OPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 ayat 4). Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut bahwa penyusunan dan penetapan Renstra OPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan OPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.



Selanjutnya Dinas Perikanan Kabupaten Jember sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Jember yang lebih sejahtera, berakhlak, berkeadilan, mandiri dan berdaya saing. Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Jember adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2017 - 2021.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten tahun 2017 - 2021, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;



16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2017-2021 disusun dengan maksud sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Jember periode tahun 2017-2021 yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jember selama kurun waktu 2017-2021, Sedangkan Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Jember tahun 2017 -2021 adalah :

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target Perubahan RPJMD tahun 2017 - 2021.



2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Jember.
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Jember baik tahunan maupun lima tahunan.
4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas
5. dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan daerah.
6. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan dalam mencapai prioritas daerah.
7. Mewujudkan hasil kontrol pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung program dan kegiatan prioritas.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Jember tahun 2017 – 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER**

- 2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Jember
- 2.2 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Jember
- 2.3 Sumber Daya Dinas Perikanan Kabupaten Jember
- 2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Jember
- 2.5 Target Capaian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2012 - 2016
- 2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Jember



- BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Jember.
  - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Jember 2017 – 2022.
  - 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Timur.
  - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
  - 21.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**
- 4.1 Visi Dinas Perikanan Kabupaten Jember
  - 4.2 Misi Dinas Perikanan Kabupaten Jember
  - 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Jember
  - 4.4 Strategi dan Kebijakan
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**
- 5.1 Rencana Program dan Kegiatan
  - 5.2 Indikator Kinerja
- BAB VI INDIKATOR KINERJA DISPERIKAN JEMBER**
- BAB VII PENUTUP**



## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISPERIKAN KABUPATEN JEMBER**

Konsepsi demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menghendaki keberadaan lembaga atau organisasi pemerintahan (birokrasi) yang bekerja secara transparan, partisipatif serta akuntabel. Dimana model kerja birokrasi tersebut merupakan ciri dalam pengelolaan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu ciri dari akuntabilitas organisasi pemerintah adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberian pelayanan yang prima, pelayanan yang adil, cepat dan berkualitas kepada masyarakat. Hal itulah yang menjadi salah satu tujuan diberikannya kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya melalui kebijakan desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah aspek perencanaan pembangunan dan aktivitas birokrasi dalam periode tertentu dan berjenjang,

Salah satu teknik penyusunan perencanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang dapat ditempuh oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Bahwa penyusunan rencana kerja strategis OPD disusun berdasarkan pada analisis internal OPD yang dapat meliputi kinerja layanan 5 (lima) tahun sebelumnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD, sumberdaya berupa sumberdaya manusia dan



aset, serta adanya peluang dan tantangan OPD pada periode 5 (lima) tahun kedepan.

## **2.1 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER**

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember, adalah sebagai berikut :

### **2.1.1 KEPALA DINAS**

#### **a. Tugas**

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan.

#### **b. Fungsi**

- Perumusan kebijakan daerah di bidang kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kelautan dan perikanan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.2 SEKRETARIAT**

#### **a. Tugas**

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

#### **b. Fungsi**

- Penyusunan rencana dan pembinaan organisasi tatalaksana;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga dinas, perlengkapan surat menyurat dan kearsipan;



- Pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan perikanan; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan.

Sekretariat terdiri dari 1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

a. Tugas

Melaksanakan urusan ketatausahaan, kehumasan, rumahtangga, protokol, dan perlengkapan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Fungsi

- Pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan Dinas, tata naskah dinas dan kearsipan serta urusan rumah tangga dan protokol;
- Pengurusan perbaikan kantor dan bangunan yang menjadi tanggungjawab Dinas;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
- Pengurusan kendaraan dan alat angkutan lain yang menjadi tanggungjawab Dinas;
- Pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
- Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian;
- Pelaksanaan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;



- Penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, mutasi, pengangkatan dan kenaikan pangkat;
- Pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai dilingkup dinas;
- Penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta meningkatkan pengembangan pendidikan dan latihan pegawai dilingkup dinas ;
- Penyusunan formasi pegawai dilingkup Dinas ;
- Penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;
- Pelaksanaan tata usaha barang perlengkapan dan perbekalan;
- Pelaksanaan pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang perlengkapan dan perbekalan;
- Pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta memelihara barang perlengkapan dan perbekalan ;
- Penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan;
- Penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh Dinas.
- Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kegiatan kelautan dan perikanan;
- Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana program kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan; dan



- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- 2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan.
- a. Tugas

Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai, pengadministrasian dan pembukuan keuangan, menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan laporan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
  - b. Fungsi
    - Penghimpunan dan pengolahan bahan untuk penyusunan anggaran;
    - Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
    - Pengolahan data usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas
    - Perhitungan anggaran dan verifikasi;
    - Penatausahaan pembayaran gaji pegawai;
    - Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas;
    - Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan bidang keuangan; dan
    - Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **2.1.3** BIDANG PERIKANAN TANGKAP

#### a. Tugas

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan melaporkan peningkatan dan pengembangan perikanan tangkap, pengolahan, pemasaran hasil perikanan tangkap serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



b. Fungsi

- Penyusunan rencana pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tangkap;
- Penyiapan bahan kebijakan prasarana dan sarana perikanan tangkap;
- Penyiapan kebijakan penyebaran informasi teknologi dan penyediaan sarana perikanan tangkap;
- Penyusunan kebijakan fasilitasi kelompok nelayan;
- Pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan perikanan tangkap;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari 1). Seksi Produksi Perikanan Tangkap; 2). Seksi Kenelayanan dan Prasarana; 3). Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tangkap. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

1) Seksi Produksi Perikanan Tangkap;

a. Tugas

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, meningkatkan mengembangkan produksi sarana perikanan tangkap serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis produksi dan sarana penangkapan meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi dan sarana penangkapan;
- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan produksi dan sarana penangkapan;
- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan rencana peningkatan pengembangan produksi dan sarana penangkapan;
- Pengumpulan data statistik perikanan tangkap;



- Pelaksanaan penyebaran informasi teknologi produksi dan penyediaan sarana penangkapan;
  - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
  - Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- 2) Seksi Kenelayanan dan Prasarana;
- a. Tugas

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan peningkatan, pengembangan kenelayanan, prasarana serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  - b. Fungsi
    - Pelaksanaan pengaturan dan pembinaan kegiatan nelayan, serta pembangunan prasarana perikanan tangkap;
    - Penumbuh kembangan Kelompok Usaha Bersama Nelayan;
    - Pelaksanaan usaha perlindungan nelayan;
    - Pelaksanaan dan pengkoordinasian usaha pengembangan desa pesisir;
    - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
    - Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tangkap;
- a. Tugas

Merencanakan, meaksanakan, mengkoordinasikan peningkatan, pengembangan kenelayanan, prasarana serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  - b. Fungsi
    - Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tangkap;



- Pelaksanaan kebijakan peningkatan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tangkap;
- Penumbuh kembangan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (POKLAHSAR) hasil perikanan tangkap;
- Pelaksanaan penyebaran teknologi penanganan mutu hasil perikanan tangkap;
- Pemberian pelayanan ijin usaha perikanan tangkap;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **2.1.4 BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA**

##### **a. Tugas**

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan pengembangan perikanan budidaya serta tugas lain yng diberikan Kepala Dinas.

##### **b. Fungsi**

- Pengembangan perikanan budidaya;
- Pengembangan dan fasilitasi prasarana dan usaha perikanan budidaya;
- Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- Pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- Pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan di bidang perikanan budidaya;
- Penyusunan kebijakan fasilitasi pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan dan kelompok masyarakat pengawas;
- Penyiapan bahan penyebaran teknologi perikanan budidaya;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan



- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari 1). Seksi Produksi Budidaya Ikan; 2). Seksi Bina Usaha dan Sumber Daya Manusia (SDM); 3). Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

1. Seksi Produksi Budidaya Ikan;

a. Tugas

Melaksanakan pengembangan produksi pembudidayaan ikan serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

b. Fungsi

- Penyiapan bahan kebijakan penyebarluasan teknologi produksi budidaya;
- Penyiapan data dan informasi statistik perikanan budidaya;
- Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);
- Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- Penyiapan ketersediaan induk dan benih unggul; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2. Seksi Bina Usaha dan Sumber Daya Manusia (SDM);

a. Tugas

Melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan bina usaha dan SDM serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- Penyiapan bahan kebijakan peningkatan pengembangan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budidaya;
- Pelaksanaan kebijakan penanganan pasca panen perikanan budidaya;



- Pelaksanaan penyebaran teknologi produksi pengolahan hasil perikanan budidaya;
- Penumbuh kembangan kelompok pembudidaya ikan dan kelompok pengolahan pemasaran;
- Pemberian pelayanan ijin usaha perikanan budidaya; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### 3. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan;

#### a. Tugas

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan melaporkan peningkatan, pengembangan, pengelolaan sumber daya ikan dan kesehatan lingkungan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### b. Fungsi

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan dan kesehatan lingkungan;
- Pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan sumber daya ikan serta dampak yang ditimbulkannya;
- Penumbuhkembangan Kelompok Masyarakat Pengawas inventarisasi data kerusakan fisik dan nilai kerugian sebagai akibat pencemaran dan kerusakan sumber daya perikanan; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **2.1.5 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.



### **2.1.6 UNIT PELAKSANA TEKNIS**

a. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga di bidang perikanan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) kecamatan atau atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Fungsi

- Penyiapan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan dinas ;
- Pelaksanaan kebijakan program kegiatan dinas ;
- Pengelolaan, pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan sarana dan prasarana ; dan
- Pelaksanaan pemeliharaan/ perawatan pembinaan pengamanan dan peningkatan pelayanan..

### **2.2 STRUKTUR ORGANISASI DISPERIKAN JEMBER**

Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Jember terdiri dari :

A. KEPALA DINAS

B. SEKRETARIS DINAS TERDIRI DARI :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan;

C. BIDANG PERIKANAN TANGKAP TERDIRI DARI :

1. Seksi Produksi Perikanan Tangkap
2. Seksi Kenelayanan dan Prasarana
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tangkap



D. BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA TERDIRI DARI :

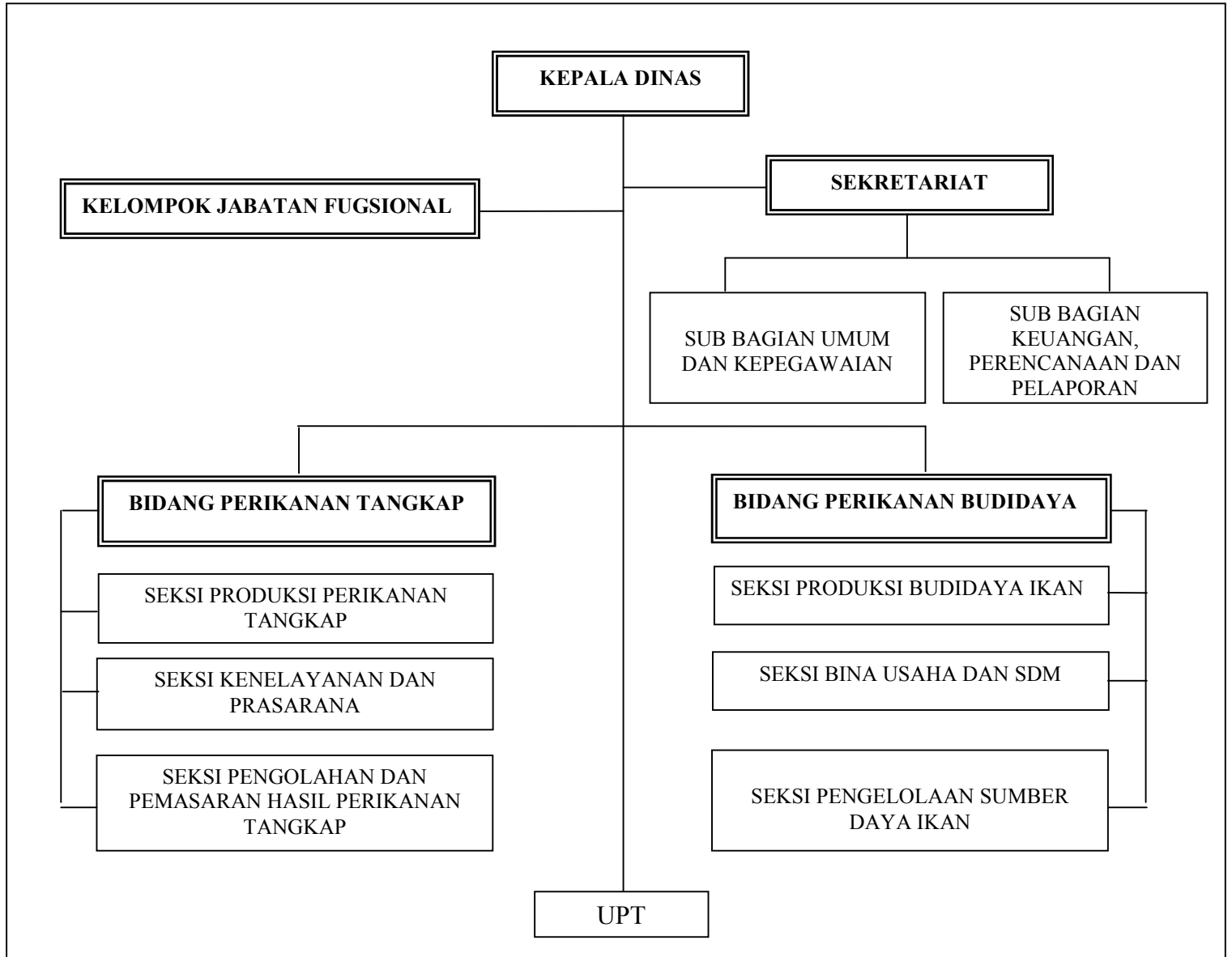
1. Seksi Produksi Budidaya Ikan
2. Seksi Bina Usaha dan SDM
3. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan

E. JABATAN FUNGSIONAL.

F. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS



Gambar 1  
Struktur Organisasi DISPERIKAN Kabupaten Jember





## 2.3 SUMBERDAYA DISPERIKAN KABUPATEN JEMBER

Sumberdaya merupakan potensi yang dimiliki oleh instansi/ dinas usaha dalam mencapai target organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi. DISPERIKAN Kabupaten Jember memiliki sumberdaya manusia sebanyak 60 (Enam Puluh) orang dengan rincian sebagai berikut.

### 1. Status

Dari keseluruhan sumberdaya manusia DISPERIKAN Kabupaten Jember yang keseluruhan berjumlah 60 (Enam Puluh) orang, dari status kepegawaian sumberdaya manusia tersebut terbagi pada status PNS dan Non PNS, seperti pada tabel berikut:

Tabel. 1  
Status Kepegawaian DISPERIKAN Jember

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	PNS	31
2	Non PNS	29
<b>JUMLAH</b>		<b>60</b>

### 2. Pangkat Golongan dan Jabatan

Berdasarkan pangkat golongan dan jabatan Aparatur DISPERIKAN Kabupaten Jember adalah sebagai berikut.

Tabel. 2  
Data Aparatur DISPERIKAN Kabupaten Jember Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	GOLONGAN IV	3
2	GOLONGAN III	18
3	GOLONGAN II	10
4	GOLONGAN I	-
<b>JUMLAH</b>		<b>31</b>



Dari tabel tingkat golongan tersebut dapat terbaca, bahwa tingkat golongan dari personil DISPERIKAN Kabupaten Jember yang terbanyak adalah golongan III, sebanyak 18 orang (58% dari seluruh staf Dinas Perikanan Kabupaten Jember). Meskipun tingkat pendidikan dan golongan cukup secara umum untuk menangani kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Jember, masih diperlukan adanya tambahan tenaga pelaksana teknis, baik dengan latar belakang teknis maupun fungsional.

### 3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan Aparatur DISPERIKAN Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel. 3  
Data Pegawai DISPERIKAN Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
<b>PNS</b>		
1	PASCA SARJANA S-3	-
2	PASCA SARJANA S-2	1
3	SARJANA S-1	22
4	DIPLOMA III	1
5	DIPLOMA II	-
6	SLTA	7
7	SLTP	-
8	SD	-
<b>JUMLAH</b>		<b>31</b>
<b>NON PNS</b>		
1	SARJANA S-1	-
2	SLTA	29
3	SD	-
<b>JUMLAH</b>		<b>29</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>60</b>



Berdasarkan tabel tingkat pendidikan diatas, dapat terbaca bahwa tingkat pendidikan dari pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Jember hanya 18 pegawai yang menduduki tingkat pendidikan Sarjana (S1), yang rata – rata memegang jabatan struktural eselon IV. Jabatan struktural eselon IV pada suatu instansi merupakan supervisor atau baris pelaksana dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya tingkat pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di lapangan.

## **2.4 KINERJA PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER**

Jenis pelayanan di Dinas Perikanan Kabupaten Jember meliputi :

a. Balai Benih ikan (BBI)

Merupakan unit pembenihan ikan yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan dalam menyediakan benih yang unggul dan bermutu. Disamping itu BBI merupakan tempat pembelajaran bagi pembudidaya, pelajar dan mahasiswa. Kelengkapan sarana dan prasarana terus disempurnakan dalam rangka mencapai standar CPIB ( Cara Pembenihan Ikan Yang Baik). Di Kabupaten Jember ada dua BBI yaitu BBI yaitu Rambigundam dan BBI Plalangan. Produksi benih ikan tahun 2016 mencapai 76.400.700 Ekor.

b. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Merupakan suatu unit yang memberikan pelayanan bagi nelayan dan Tempat pelelangan ikan belum berfungsi sebagai tempat pelelangan ikan, melainkan baru sebagai tempat penimbangan dan transaksi jual beli ikan tanpa proses pelelangan. Hal ini terjadi karena hampir 95 persen nelayan terikat hutang dengan pedagang/ pengambek. Hasil tangkapannya disetor dan dijual oleh pedagang yang memberi hutang. Lokasi pendaratan perahu tidak tersentralisasi di TPI, tetapi menyebar disepanjang sungai Bedadung dan sungai Besini Puger.



c. Pelayanan Perijinan Usaha Perikanan

Dalam rangka pelayanan perijinan usaha perikanan di Dinas Perikanan Kabupaten Jember melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 6 /Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu di Kabupaten Jember dan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perijinan Usaha Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember. Sasaran yang diharapkan adalah semua usaha perorangan atau badan untuk atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, memungut atau mengarahkan ikan untuk tujuan komersial akan dikenakan ijin usaha perikanan. Pada Tahun 2016 ijin usaha perikanan yang diterbitkan 12 Eksemplar ijin usaha yaitu untuk usaha penangkapan ikan, Pengolahan dan Budidaya Perikanan.

## **2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER**

### **2.5.1 TANTANGAN**

- Penyediaan dan penyebaran benih ikan belum optimal
- Minat masyarakat dalam pemanfaatan potensi budidaya ikan masih kurang.
- Fluktuasi harga ikan yang tidak menentu
- Penyediaan pakan alami untuk benih ikan masih kurang.
- Terjeratnya nelayan ke pengambang menjadi penghambat peningkatan pendapatan nelayan
- Lokasi pelabuhan kurang strategis sehingga menghambat perkembangan perikanan tangkap
- Jumlah cold storage untuk penyimpanan dan pengolahan ikan tangkap masih kurang.
- Industri pengolahan hasil ikan belum dikembangkan secara optimal.



- Sering terjadi kecelakaan perahu di muara pelawangan Puger.

### **2.5.2** PELUANG

- Teknologi dibidang perikanan semakin maju.
- Adanya dukungan Pemerintah Daerah dalam pembangunan perikanan.
- Terbukanya akses informasi teknologi dan pemasaran.
- Potensi pengembangan komoditi ikan yang berupa populasi ikan tersedia cukup tinggi.



## **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER**

Setelah dilakukan pengkajian data, evaluasi dan analisa yang mendalam dari pembangunan Perikanan Kabupaten Jember dapat dirangkum beberapa permasalahan pokok yang perlu dipecahkan dimasa mendatang yaitu :

1. Masih rendahnya kemampuan sumberdaya manusia bidang Perikanan baik dalam memproduksi dengan kualitas tinggi, penanganan pasca panen maupun memasarkan produk - produk hasil Perikanan.
2. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan Nelayan dan Pembudidaya dalam menerapkan teknologi usaha bidang Perikanan yang ramah lingkungan.
3. Sistem usaha Perikanan yang masih bersifat tradisional baik dalam manajemennya maupun pengembangan usahanya.
4. Terbatasnya modal usaha Perikanan.
5. Belum siapnya sebagian besar produk Perikanan bersaing untuk memasuki pasar global karena produk yang dihasilkan belum efisien dan kualitasnya masih rendah.
6. Kurangnya SDM aparatur teknis Perikanan sebagai tenaga operasional di lapangan dari berbagai jenis/jenjang kompetensi.

### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Penelaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama



lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember, yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Jember 2016 – 2021. Proses telaah ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor peng-hambat dan pendorong pelayanan BAPPEDA yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Jember tahun 2016-2021, adalah :

**"Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera,  
Berkeadilan, dan Mandiri"**

dengan penjelasan sebagai berikut:

**Jember Bersatu**

Adalah wujud dari adanya rasa kebersamaan, sinergi dan gotong royong dari masyarakat, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Massa, Politik, Perusahaan Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers, Perguruan Tinggi, Tokoh-Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta segenap unsur masyarakat lainnya untuk bersama-sama dalam perannya masing-masing, berupaya terbaik untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Masing-masing komponen masyarakat tersebut menyadari perannya yang sangat penting untuk kemajuan daerah. Sehingga proaktif menyediakan diri untuk berperan serta dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat.

Sangat disadari, rasa kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat semakin memudar. Oleh sebab itu, peran pemerintah kembali melakukan upaya agar masyarakat tergugah untuk kembali mau bergerak dan memberikan sumbangsih dalam pembangunan. Tanpa adanya kebersamaan,



gotong royong dan sinergi, mustahil kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebab, kemampuan pemerintah ditinjau dari sisi ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran sangat terbatas untuk mengakomodasi seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Jember Bersatu adalah sebuah proses sekaligus target yang merupakan gerakan pemerintah daerah untuk mensinergikan seluruh potensi masyarakat di wilayah Kabupaten Jember, potensi dalam jaringan level nasional, bahkan internasional untuk mencapai tujuan pembangunan. Sinergi itu diarahkan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

### **Jember Lebih Makmur dan Sejahtera**

Adalah terwujudnya peningkatan kemakmuran yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat, bergairahnya kehidupan perekonomian, peningkatan produktifitas tenaga kerja, serta terjaganya harga-harga barang dalam jangkauan daya beli masyarakat. Sebagai buah dari kemakmuran ini adalah kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan yang aman dan tenteram, rukun dan damai.

Di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis, maupun intelektualitas. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan makmur.

### **Jember Berkeadilan**

Adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi



awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan. Proses pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar, diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati secara berkeadilan.

Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau termarginalisasi, agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat. Keberpihakan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

### **Jember Mandiri**

Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun, dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan kekuatan sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Membangun kemandirian sosial merupakan upaya mengembangkan kemampuan "berdikari" (Berdiri di Atas Kaki Sendiri), dan secara proaktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan struktural yang memasung potensinya, baik secara ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam politik; Berkedaulatan hukum; Berdikari dalam ekonomi; dan Berkepribadian dalam kebudayaan; yang berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemandirian juga mengandung aspek kemampuan daya saing Jember, bukan saja karena keunggulan komparatif (*comparative advantage*), tetapi terutama keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, usaha mikro,



kecil, dan menengah (UMKM), khususnya menghadapi ASEAN *Economic Community* yang dimulai akhir tahun ini.

Kemandirian juga terkait dengan upaya meningkatkan daya saing budaya lokal menghadapi ASEAN *Socio Cultural Community* pada tahun 2015, agar tidak tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya. Puncak-puncak kebudayaan wilayah yang merupakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional harus terus dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya tetap mampu berkepribadian dalam kebudayaan. Budaya dan tradisi lokal yang merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) harus pula dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan sebagai basis pembangunan, yang pada gilirannya dapat memperkuat pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan. Kearifan lokal merupakan pengetahuan setempat (*local knowledge*), atau kecerdasan lokal (*local genius*), yang menjadi dasar identitas budaya (*cultural identity*).

Kemandirian masyarakat juga diarahkan pada terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual, karena kesejahteraan tanpa akhlak dan moral akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Akhlak merupakan budi pekerti, perangai, tabiat, atau moralitas luhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Visi terwujudnya "Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri", berlangsung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karenanya pembangunan Jember juga ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan



serta kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Jember untuk Indonesia.

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jember Tahun 2016-2021 yaitu "Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri", tersebut, ditempuh melalui 3 misi yang diberi Judul "Jember Baru, Jember Bersatu". Tiga misi ini merupakan gambaran berbagai usaha untuk menjamin tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jember.

Sebagaimana kita sadari bersama, selama 10 tahun terakhir ini, dengan tetap menghormati hasil-hasil pembangunan yang ada, kondisi masyarakat Jember masih belum sepenuhnya dapat disentuh pembangunan. Rasa kegotongroyongan di kalangan masyarakat sangat rendah. Potensi besar di kalangan masyarakat, pada akhirnya tidak dapat dioptimalkan untuk kebutuhan pembangunan. Semuanya berjalan sendiri tanpa koordinasi optimal. Inilah esensi pembangunan selama lima tahun ke depan yang menjadi fokus, yaitu



mengupayakan agar peran serta masyarakat secara nyata dapat dikonsolidasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Masalah-masalah pembangunan yang mengemuka, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, masalah kesehatan, pendidikan dan rendahnya indeks pembangunan manusia akan semakin cepat dan mudah diatasi dengan kebersamaan dan sinergi.

Orientasi kerakyatan dalam Jember Bersatu menempati porsi yang penting. Sebab kewenangan yang diperoleh pemerintah daerah melalui proses Pemilihan Kepala daerah haruslah dipertanggungjawabkan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat, khususnya kaum dhuafa (miskin) yang selama ini kehidupannya terabaikan. Kaum dhuafa ini adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan (*powerless*) akibat termarginalisasi (*marginalized*), keterampasan (*deprivation*), serta pembungkaman (*silencing*) dalam proses pembangunan. Secara sosial ekonomi mereka adalah berstatus kesejahteraan 40% terendah, sebagaimana kriteria pengelompokan yang digunakan dalam Basis Data Terpadu, Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Jumlah kaum dhuafa ini mencapai  $\pm$  250.000 Kepala Keluarga.

Tiga misi "Jember Baru, Jember Bersatu" untuk mewujudkan Visi Jember "Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri", adalah sebagai berikut :

**Misi Pertama : Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.**

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik. Reformasi Birokrasi adalah prasyarat (*pre-requisite*), untuk tercapainya dan terwujudnya proses sinergi pembangunan yang mampu mengkonsolidasikan segenap potensi masyarakat. Budaya paternalistik yang berkembang di masyarakat, menuntut pola kepemimpinan yang bersih, mengayomi dan aspiratif.



Kekuatan kepemimpinan inilah yang akan mengakomodasi proses perubahan dan reformasi birokrasi secara optimal.

Pelayanan Publik yang profesional juga penting sebagai langkah lanjutan dari keberhasilan reformasi birokrasi. Tuntutan masyarakat modern terhadap pelayanan publik yang responsif saat ini tidak dapat lagi ditawar, apalagi di tengah-tengah dinamika pembangunan ekonomi yang sangat luar biasa serta persaingan yang ketat antar daerah ataupun antar negara. Pendekatan 'Old Public Administration' dimana masyarakat dianggap sebagai klien yang diarahkan kebutuhan pelayanannya harus bergeser ke pendekatan 'New Public Management' dimana masyarakatlah yang menentukan kebutuhan pelayanannya sebagai pengguna layanan. Pemerintah berkewajiban memberikan alternatif pelayanan yang rasional dan berkualitas. Oleh karena itu standarisasi pelayanan perlu diterapkan kesuluruh organisasi pelayanan pemerintah. Bahkan pelayanan juga bergerak ke arah pendekatan 'New Public Service' dimana masyarakat yang termarginalkan terutama kaum dhuafa mendapatkan prioritas pelayanan sehingga aksesibilitas pelayanan terjangkau oleh mereka.

Hal penting dalam mewujudkan misi reformasi birokrasi dan pelayanan publik ini adalah upaya untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan desa dan kecamatan. Pemerintahan desa dan kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. Kualitas pemerintahan desa dan kecamatan akan secara langsung berimplikasi pada kualitas pelayanan pada masyarakat.

Indikator Kinerja: IKM, Opini BPK, Nilai LAKIP/LPPD, Angka Pelanggaran ASN

**Misi Kedua : Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan.**

Misi ini untuk mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat



sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebutuhan dasar itu meliputi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial serta keamanan dan ketertiban di masyarakat. Rancangan pembangunan perlu diarahkan untuk mengembangkan akses terhadap pemenuhan dasar tersebut secara merata dan berkeadilan. Hal ini juga merupakan upaya untuk percepatan program penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk di dalamnya kerukunan antar-umat beragama, sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sekaligus merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa dan harmoni sosial, dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, serta penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Indikator Kinerja: IPM, Index Gini Ratio, Angka kemiskinan, Angka Pengangguran, Angka Harapan Hidup, Laju Pertumbuhan Penduduk

**Misi Ketiga : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agro-industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.**

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi. Pembangunan ekonomi ini juga harus berkelanjutan dalam arti memperhatikan dan menimbang aspek eksistensi lingkungan hidup dan keseimbangan. Pembangunan ekonomi dan pembangunan secara luas juga harus mengacu pada tata ruang. Dalam hal ini perlu diwujudkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah sampai pada perencanaan detailnya di level kecamatan.



Peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta percepatan kinerja sektor agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah. Serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Seluruh aktifitas ekonomi diatas harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sehingga sumber daya alam dan lingkungan yang dimiliki dapat terjaga pemanfaatannya dan terhindar dari kerusakan lingkungan. Hak-hak warga negara dimasa yang akan datang tidak akan dikorbankan oleh kebijakan ekonomi yang meruak lingkungan.

Indikator Kinerja: Angka Pertumbuhan Ekonomi, Angka Inflasi, Angka PAD, PDRB, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI DAN RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI adalah "Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional" dengan misi:

1. **Kedaulatan (Sovereignty)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. **Keberlanjutan (Sustainability)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;



3. **Kesejahteraan** (*Prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan diatas sesuai dengan visi Dinas Perikanan Dan Kelautan Jawa Timur, yaitu : **"Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak"**, dengan Misi :

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi;
3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang;
4. Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan public
5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial

Visi dan Misi tersebut diatas, sejalan dengan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Jember terutama dalam penyediaan pangan asal ikan yang aman untuk dikonsumsi masyarakat selain itu juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu Misi diatas sangat relevan dengan Dinas Perikanan Kabupaten Jember yaitu " Meningkatkan Profesionalisme Sumberdaya Manusia Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan". Dan *"Mengembangkan Produk-Produk Unggulan Yang Berdaya Saing Menghadapi Pasar Global"*

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

#### **A. TELAAHAN RTRW**

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Dalam rangka penataan ruang di Kabupaten Jember telah ditetapkan



Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah Kecamatan di Kabupaten Jember termasuk kedalam Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang memiliki fungsi utama pengembangan kawasan meliputi pusat pemerintahan, pusat kesehatan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa.

Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energy, sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan.

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi kawasan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan



kawasan peruntukan lainnya meliputi pertahanan dan keamanan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan dan kawasan sektor informal.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

#### B. TELAAHAN KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan AMDAL yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait.

KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan



---

Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan DISPERIKAN Kabupaten Jember senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi DISPERIKAN Kabupaten Jember adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi DISPERIKAN Kabupaten Jember dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi DISPERIKAN Kabupaten Jember diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi DISPERIKAN Kabupaten Jember di masa lima tahun mendatang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

1. Hasil analisis gambaran pelayanan DISPERIKAN Kabupaten Jember



2. Hasil analisis Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Pusat dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
3. Hasil telaahan RTRW
4. Hasil analisis KLHS

Isu-Isu strategis pembangunan Perikanan di Kabupaten Jember antara lain :

1. Sekretariat
  - 1.1. Belum tercukupinya kebutuhan SDM aparatur perikanan.
  - 1.2. Kompetensi aparatur perikanan belum memadai.
2. Bidang Perikanan Tangkap
  - 2.1 Pemanfaatan potensi perikanan tangkap belum optimal.
  - 2.2 Pemberdayaan dan perlindungan nelayan masih kurang.
  - 2.3 Kurangnya tingkat kemampuan SDM perikanan tangkap (Nelayan) dalam mengikuti perkembangan teknologi penangkapan ikan.
  - 2.4 Kurangnya permodalan dalam rangka peningkatan kemampuan usaha penangkapan ikan.
3. Bidang Perikanan Budidaya
  - 3.1. Pemanfaatan potensi perikanan budidaya belum optimal.
  - 3.2. Kurangnya tingkat kemampuan SDM perikanan budidaya dalam mengikuti perkembangan teknologi budidaya ikan.
  - 3.3. Masih kurangnya penanganan pasca panen dan pengolahan budidaya ikan.
  - 3.4. Kurangnya permodalan dan akses perbankan
  - 3.5. Kurangnya kemampuan berorganisasi kelompok yang ada, sehingga tingkatan kelas kelompok masih rendah.
  - 3.6. Perlunya pengaturan mekanisme produksi ikan agar sesuai dengan pasar lokal dan regional.
  - 3.7. Perlunya pengenalan produk perikanan dan hasil olahannya kepada masyarakat.
  - 3.8. Perlunya induk dan benih yang berstandart nasional.



## **BAB IV**

# **TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Selaras dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, Dinas Perikanan Kabupaten Jember merupakan OPD yang berperan dalam penuntasan Misi III yaitu "Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agro-industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan." dengan Tujuan "Meningkatkan Nilai PDRB Kategori Perikanan" dan Sasaran yaitu :

### 1. Meningkatnya Produksi Perikanan

Strategi : meningkatkan surplus produksi perikanan serta meningkatkan produksi komoditas hasil perikanan lainnya.

Kebijakan : Peningkatan mutu intensifikasi perikanan serta optimalisasi penggunaan lahan perikanan

### 2. Meningkatnya Nilai Tambah Hasil dan Daya Saing Produk Perikanan.

Strategi : Penggalian potensi sumberdaya perikanan dengan teknologi tepat guna

Kebijakan : Meningkatkan Produksi dan Produksifitas Perikanan dan Kelautan Berbasis Teknologi dan Keunggulan Sumberdaya Lokal

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Dinas Perikanan Kabupaten Jember menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sebagaimana terlampir pada Tabel 4.1.



## **BAB V**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah oleh karena itu maka secara operasional disusunlah rencana program dan kegiatan indikatif sebagaimana terlampir dalam Tabel 5.1 dan Tabel 5.2.



## **BAB VI** **INDIKATOR KINERJA DISPERIKAN KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk jelasnya Indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang dilaksanakan DISPERIKAN Kabupaten Jember dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai dengan indikator kinerja yang dipakai dapat dilihat pada tabel 6.1.



## **BAB VII PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis DISPERIKAN Kabupaten Jember Tahun 2017-2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur DISPERIKAN Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi DISPERIKAN Kabupaten Jember yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2017 – 2021.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur DISPERIKAN Kabupaten Jember, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis DISPERIKAN Kabupaten Jember ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) DISPERIKAN Kabupaten Jember.

Jember, Desember 2017

Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN JEMBER

**ROKHMATULLAH HADI WITONO, SP**

Penata Tingkat I  
NIP. 19731023 199803 1 003



# LAMPIRAN



**TABEL 4.1**

**MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan Nilai PDRB Kategori Perikanan	Nilai PDRB Kategori Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	1%	2%	2%	2%	1%	1%	Meningkatkan surplus produksi perikanan serta meningkatkan produksi komoditas hasil perikanan lainnya	Peningkatan mutu intensifikasi perikanan serta optimalisasi penggunaan lahan perikanan	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
													Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
													Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan



			Persentase Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya	6%	8%	8%	8%	8%	8%	Penggalian potensi sumberdaya perikanan dengan teknologi tepat guna		Program Pengembangan Budidaya Perikanan
		Meningkatnya Nilai Tambah Hasil dan Daya Saing Produk Perikanan	Nilai NTN	-	102,5	103,25	104	104,5	105,25	Penggalian potensi sumberdaya perikanan dengan teknologi tepat guna	Meningkatkan Produksi dan Produktifitas Perikanan dan Kelautan Berbasis Teknologi dan Keunggulan Sumberdaya Lokal	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
												Program Perlindungan Nelayan
												Program Pengembangan SDM Perikanan
												Program Pengembangan Budidaya Perikanan



**Tabel 5.1**  
**Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Tiap Program Prioritas Pembangunan**  
**pada DISPERIKAN Kabupaten Jember Tahun 2017 – 2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Data Capaian Terakhir Rens tra	Total Anggaran	Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020						Tahun 2021	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					target	Rp
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	
Meningkatkan Nilai PDRB Kategori Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya	3.01.3.01.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya			2.539.128.000		1.674.787.000		1.808.769.960		1.953.471.556		210.974.928		2.278.529.223		10.465.660.667	Bidang Perikanan Budidaya	Kabupaten Jember
					- Tambak (Ton)	1.038,5	1.050		1.155		1.247		1.346		1.453		1.569					
					- Kolam (Ton)	8.092,7	8.814		9.334		10.080		10.886		11.756		12.696					
					- Mina Padi (Ton)	11,0	11		12		14		15		16		18					
					- Jumlah POKDAK AN (Kelompok)	208	220		235		253		273		294		317		1.592			
				Pengembangan Bibit Unggul	Jumlah Jenis Ikan Unggul yang Dikembangkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					



			3.01.3.01.20.02	Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Jumlah Kelompok Tani Pembudidaya Ikan yang Didampingi	90	-	-	110	420.030.000	120	453.632.400	120	489.922.992	150	529.116.831	165	571.446.177	665	2.464.148.400		
					Jumlah Peralatan Budidaya Ikan Yang dihibahkan pada Pembudidaya Ikan	6			10		10		10		10		10		50			
			3.01.3.01.20.03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah Pembinaan Perikanan Budidaya	8	10	781.474.000	20	60.000.000	20	64.800.000	20	69.984.000	20	75.582.720	20	81.629.337	110	1.133.470.057		
			3.01.3.01.20.04	Peningkatan dan Pengembangan Produktifitas BBI	Jumlah Sarana dan Prasarana BBI yang Berhasil di Tingkatkan	6	8	1.757.654.000	8	1.194.757.000	8	1.290.337.560	8	1.393.564.564	8	1.505.049.729	8	1.625.453.707	48	8.766.816.560		
			3.01.3.01.26	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan	Prosentase Terawasanya dan Terkendalinya Sumberdaya Perikanan	-	-	-	60	67.775.900	64	73.197.972	69	79.053.809	74	85.378.114	79	92.208.363	79%	397.614.158	Bidang Perikanan Budidaya	Kabupaten Jember
				Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Perikanan	Jumlah POKMAS WAS yang Berhasil Dibentuk	-	-	-	16	67.775.900	17	73.197.972	18	79.053.809	19	85.378.113	20	92.208.362	90	397.614.156		





			3.01.3.01.21.01	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap yang Didampingi	90	96	37.300.000	120	48.900.000	140	52.812.000	150	57.036.960	160	61.599.916	170	66.527.910	836		
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah Unit TPI yang Mengalami Pemeliharaan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah Unit TPI yang Direhabilitasi	1	1	378.469.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
			3.01.3.01.21.06	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap yang Berhasil Ditingkatkan	7	9	289.595.000	10	871.144.750	10	940.836.330	12	1.016.103.236	14	1.097.391.495	14	1.185.182.814			
			3.01.3.01.21.07	Peningkatan Sarana dan Prasarana TPI	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana TPI yang Berhasil di tingkatkan	5	5	177.800.000	6	114.500.000	6	123.660.000	6	133.552.800	6	144.237.024	6	155.775.985			
			3.01.3.01.21.08	Peningkatan Operasional TPI	Prosentase Tingkat Kecepatan dan Ketepatan dalam Pelayanan	-	-	-	100	138.900.000	100	150.012.000	100	162.012.960	100	174.973.996	100	188.971.916			



			3.01.3.01.23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Prosentase Meningkatnya nilai Produksi hasil Perikanan (Year on Year)	5	6	446.747.500	8	450.000.000	8	486.000.000	10	524.880.000	10	566.870.400	10	612.220.032			Program Perikanan Tangkap	Kabupaten Jember
			3.01.3.01.23.02	Peningkatan Usaha dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Temu Usaha Perikanan	1	1	237.170.000	1	300.000.000	2	324.000.000	2	349.920.000	3	377.913.600	3	408.146.688				
					Jumlah Pelaksanaan Gemar Makan Ikan	-	-	-														
			3.01.3.01.23.03	Pendataan Produksi Perikanan	Jumlah Laporan Data Produksi Perikanan	4	4	16.057.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			3.01.3.01.23.04	Peningkatan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Pelatihan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan	1	1	198.520.000	4	150.000.000	4	162.000.000	4	174.960.000	5	188.956.800	5	204.073.344				
			3.01.3.01.25	Program Perlindungan Nelayan	Jumlah Nelayan yang Terasuransikan	-	-	122.425.198	3.000	667.250.000	3.240	720.630.000	3.499	778.280.400	3.778	840.542.832	4.080	907.786.258			Bidang Perikanan Tangkap	Kabupaten Jember
			3.01.3.01.25.01	Asuransi Nelayan	Jumlah Nelayan yang Terasuransikan	-	-	122.425.198	3.000	667.250.000	3.240	720.630.000	3.499	778.280.400	3.778	840.542.832	4.080	907.786.258				
			3.01.3.01.28	Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	Jumlah Pembinaan Kelompok Nelayan	-	-	-	6	391.320.000	7	422.625.600	7	456.435.648	7	492.950.499	8	532.386.539			Bidang Perikanan Tangkap	Kabupaten Jember



			3.01.3.01 .28.01	Pembinaan Kelompok Masyarakat at Nelayan	Jumlah Pembinaan Kelompok Nelayan	-	-	-	6	391.320. 000	7	422.625. 600	7	456.435. 648	7	492.950. 499	8	532.386. 539				
				<b>Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat at Pesisir</b>	<b>Jumlah Kelompok Binaan</b>	173	181	68.333.5 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat at Pesisir	Jumlah Pembinaan Kelompok Ekonomi Pesisir	4	4	68.333.5 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				<b>Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan</b>	<b>Jumlah Kelompok Binaan</b>	158	164	77.155.0 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Peningkatan Fungsi Penyuluhan Perikanan dan Kelautan	Jumlah Penyuluhan Perikanan	10	11	77.155.0 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				



Tabel 5.2  
 Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif  
 Program-program rutin  
 pada DISPERIKAN Kabupaten Jember Tahun 2017 – 2021

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Data Capaian Terakumulasi Renstra	Total Anggaran	Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.01.3.0 1.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Layanan Penunjang Administrasi Perkantoran	100	100%	678.339.257	100%	552.561.332	100%	596.766.238	100%	644.507.537	100%	696.068.139	100%	751.753.590	100%	3.919.996.093	Sekretariat	Kabupaten Jember
3.01.3.0 1.01.02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Selama 1 Tahun	100	100%	170.033.147	100%	108.200.000	100%	116.856.000	100%	126.204.000	100%	136.300.320	100%	147.204.345	100%	804.797.812		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase Ketersediaan Jasa Kebersihan Kantor Selama 1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				



		Tahun																	
3.01.3.0 1.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase Ketersediaan ATK Kantor Selama 1 Tahun	100	100%	12.508.500	100%	20.000.000	100%	21.600.000	100%	23.328.000	100%	25.194.240	100%	27.209.779	100%	129.840.519		
3.01.3.0 1.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	100%	8.123.110	100%	18.500.000	100%	19.980.000	100%	21.578.400	100%	23.304.672	100%	25.169.045	100%	116.655.227		
3.01.3.0 1.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik selama 1 Tahun	100	-	-	100%	5.000.000	100%	5.400.000	100%	5.832.000	100%	6.298.560	100%	6.802.444	100%	29.333.004		
3.01.3.0 1.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8	9	91.010.000	6	83.777.332	7	90.479.518	7	97.717.880	7	105.535.310	8	113.978.135	8	582.498.175		



3.01.3.0 1.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase Ketersediaan Bahan Bacaan Selama 1 Tahun	100	100%	3.000.000	100%	8.400.000	100%	9.072.000	100%	9.797.760	100%	10.581.580	100%	11.428.106	100%	52.279.446		
3.01.3.0 1.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Ketersediaan Makanan dan Minuman	1.632	1.632	28.560.000	720	21.600.000	720	23.328.000	720	25.194.240	720	27.209.779	720	29.386.561	720	155.278.580		
3.01.3.0 1.01.27	Penunjang Administrasi dan Operasional Kantor/Kedinasan	Prosentase Ketersediaan Tenaga Penunjang Administrasi Kantor Selama 1 Tahun	100	100	365.104.500	100	287.084.000	100	310.050.720	100	334.854.777	100	361.643.159	100	390.574.612	100%	2.049.311.768		
<b>3.01.3.0 1.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Guna</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>107.320.097</b>	<b>60</b>	<b>178.832.000</b>	<b>62</b>	<b>193.138.560</b>	<b>65</b>	<b>208.589.644</b>	<b>67</b>	<b>225.276.816</b>	<b>70</b>	<b>243.298.961</b>	<b>70</b>	<b>1.156.456.078</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Kabupaten Jember</b>
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Unit Gedung yang di Bangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.01.3.0 1.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	1	40.000.000	1	43.200.000	1	46.656.000	1	50.388.480	1	54.419.558	1	188.008.038		



	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Pengadaan Mebeleur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Tempat Parkir dan Pos Penjagaan	Jumlah Unit Tempat Parkir dan Pos Penjagaan Yang di Bangun	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Pavingisasi dan Pagar Kantor	Jumlah Paket Pekerjaan Pavingisasi dan Pagar Kantor	1	1	19.660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19.660.000	-	-
	Pengadaan Tanaman	Jumlah Tanaman Yang ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan/Pembangunan Taman	Jumlah Taman Yang di Bangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.01.3.0 1.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Unit Gedung Yang menjalani Pemeliharaan	3	-	-	2	60.000.000	2	64.800.000	2	69.984.000	2	75.582.720	2	81.629.337	2	351.996.057	-	-
3.01.3.0 1.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Unit Mobil Jabatan Yang Menjalani Pemeliharaan	1	1	10.100.000	1	30.732.000	1	33.190.560	1	35.845.804	1	38.713.469	1	41.810.546	1	190.392.379	-	-



3.01.3.0 1.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang Menjalani Pemeliharaan	21	30	22.30 0.097	2	36.600. 000	30	39.528. 000	30	42.690. 240	30	46.105. 459	30	49.793. 895	152	237.017 .691		
3.01.3.0 1.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga dan Komputer	Jumlah Alat Kantor Yang Menjalani Pemeliharaan	20	25	2.400. 000	50	11.500. 000	50	12.420. 000	50	13.413. 600	50	14.486. 688	50	15.645. 623	275	69.865. 911		
	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Unit Gedung Yang di Rehabilitasi	-	1	52.86 0.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	52.860. 888		
3.01.3.0 1.03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Prosentase Angka Presentasi (Kehadiran Aparatur)</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>18.17 8.000</b>	<b>87</b>	<b>17.900. 000</b>	<b>88</b>	<b>19.331. 000</b>	<b>89</b>	<b>20.878. 560</b>	<b>90</b>	<b>22.548. 844</b>	<b>91</b>	<b>24.352. 752</b>	<b>91</b>	<b>123.189 .156</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Kabupaten Jember</b>
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri/Pakaian Olahraga/Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Jumlah Paket Pakaian Yang Diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				



3.01.3.0 1.03.05	Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari - Hari Besar Nasional	Jumlah Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	-	1	18.178.000	4	17.900.000	4	19.332.000	4	20.878.560	4	22.548.844	4	24.352.752	21	123.190.156		
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Prosentase Jumlah Aparatur Yang Menjalani Up Greeding SDM Aparatur</b>	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/Seminar Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimtek/Workshop/Sosialisasi/Seminar yang dilaksanakan	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Pelaksanaan Study Banding/Kunjungan Kerja/dll	Jumlah Study Banding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Penilaian Penetapan Angka Kredit	Jumlah Tenaga Fungsional Tertentu yang di Nilai Angka Kreditnya	8	8	13.277.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	13.277.500			



3.01.3.0 1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Angka Nilai LAKIP SKPD	55	56	77.00 2.000	60	120.47 2.996	62	130.11 0.837	64	140.51 9.704	66	151.76 1.281	68	163.90 2.183	68	783.769 .001	Sekrariat	Kabupaten Jember
3.01.3.0 1.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Lakip	1	1	20.52 0.000	3	38.922. 996	3	42.036. 835	3	45.399. 782	3	49.031. 765	3	52.954. 306	16	248.865 .684		
3.01.3.0 1.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Akhir Tahun	Jumlah Laporan yang Disusun	3	3	4.650. 000	1	10.050. 000	1	10.854. 000	1	11.722. 320	1	12.660. 105	1	13.672. 914	8	63.609. 339		
3.01.3.0 1.06.05	Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Disusun	1	1	35.58 2.000	2	30.000. 000	2	32.400. 000	2	34.992. 000	2	37.791. 360	2	40.814. 668	11	211.580 .028		
3.01.3.0 1.06.06	Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang Disusun	1	1	16.25 0.000	2	25.000. 000	2	27.000. 000	2	29.160. 000	2	31.492. 800	2	34.012. 244	11	162.915 .044		
3.01.3.0 1.06.09	Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Barang Daerah di SKPD	Jumlah Laporan Aset Daerah SKPD	1	-	-	1	16.500. 000	1	17.820. 000	1	19.245. 600	1	20.785. 248	1	22.448. 067	5	96.798. 915		



	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monev Dilaksanakan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.01.3.0 1.08	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Prosentase RKPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya yang Sesuai Dengan Renstra	100	100%	80.68 4.385	100%	70.480. 000	100%	76.118. 400	100%	82.207. 872	100%	88.784. 501	100%	95.887. 261	100%	494.162 .419	Sekretariat	Kabupaten Jember
3.01.3.0 1.08.06	Penyusunan Renstra, RKPD, Dan Dokumen Perencanaan Lainnya	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	4	4	50.55 7.000	3	35.480. 000	3	383.18 4.400	3	41.383. 872	3	44.694. 581	3	48.270. 148	19	50.557. 000		
3.01.3.0 1.08.07	Penyusunan Profil SKPD	Jumlah Profil SKPD yang Disusun	1	1	30.12 7.385	1	35.000. 000	1	37.800. 000	1	40.824. 000	1	44.089. 920	1	47.617. 113	6	235.458 .418		



Tabel 6.1 Indikator Kinerja OPD Dinas Perikanan 2017

NO	SUB URUSAN/ INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	OPD
	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2015	2016	2017	2017		
<b>1</b>	<b>Perikanan Tangkap</b>						
1.1	Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	2.712,90	2.809,86	2.866,06	2.832,90		Dinas Perikanan
1.2	Cakupan bina kelompok nelayan pembudidaya/pengolahan dan pemasaran (%)	13	30	30	35		Dinas Perikanan
1.3	Cakupan penyuluh kelautan/perikanan yang kompeten (%)	50	65	70	70		Dinas Perikanan
1.4	Produksi produk hasil olahan perikanan (ton)	3.514	3.278,17	3.709	3.653		Dinas Perikanan
1.5	Jumlah Kawasan Minapolitan	0	0	1 kawasan	0 kawasan		Dinas Perikanan
1.6	Persentase nelayan yang terikat pada pengambek /rentenir (%)	95	90	90	90		Dinas Perikanan
1.7	Nilai NTN (Nilai Tukar Nelayan)	101,25	-	102,5			Dinas Perikanan
1.8	Persentase nelayan yang menerima asuransi (BPJS Ketenagakerjaan) (%)	0	0	23,3	40		Dinas Perikanan
1.9	<b>NTP (Nilai Tukar Petani) dan NTN (Nilai Tukar Nelayan)</b>						
	a. NTN	101,25	-	102,5			Dinas Perikanan
1.10	<b>Jumlah produksi perikanan</b>						Dinas Perikanan
	a. Perikanan Tangkap (Ton)	9.373	9.366,20	9.521,21	9.413,04		
1.11	<b>Persentase kelompok tani dan nelayan yang menerima bantuan sarana prasarana, permodalan (%) :</b>						
	a. KUB Nelayan	25	8	45	0		Dinas Perikanan
1.12	<b>Persentase nelayan dan petani yang berakses dengan lembaga keuangan (koperasi, LKMM, bank, pegadaian, asuransi) (%) :</b>						
	a. Nelayan	4,9	16	17	17		Dinas Perikanan
<b>2</b>	<b>Perikanan Budidaya</b>						



2.1	<b>Luas areal pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar (Ha)</b>	470	521,05	522,5	520,13		Dinas Perikanan
2.2	<b>Jumlah produksi perikanan</b>						Dinas Perikanan
	b. Perikanan Budidaya (Ton)						
	1. Tambak	1.038,50	1.302,50	1.350	1.354		
	2. Kolam	8.092,7	9.573,90	9.580	10.353		
	3. Mina Padi	11	10,06	12	6,7		
2.3	<b>Konsumsi ikan (Kg/kap/th)</b>	15	21,25	22	22,07		Dinas Perikanan
2.4	<b>Persentase kelompok tani dan nelayan yang menerima bantuan sarana prasarana, permodalan (%) :</b>						
	a. Kelompok usaha perikanan budidaya (pokdakan)	29	17	45	0		Dinas Perikanan
2.5	<b>Kontribusi sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan terhadap PDRB (%)</b>	30,66	30,25	29,28	30,25		Dinas Perikanan



## INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Nilai PDRB Kategori Perikanan	1. Nilai PDRB Kategori Perikanan	Nilai PDRB atas dasar harga konstan yang di hitung BPS	Bidang Perikanan Budidaya Bidang Perikanan Tangkap	BPS
2	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	1. Jumlah Produksi hasil Perikanan pertahun	Jumlah Tonase hasil produksi Perikanan per komoditas yang di hasilkan selama 1 tahun	Bidang Perikanan Budidaya Bidang Perikanan Tangkap	Laporan Statistik Bulanan Dinas Perikanan
3	Meningkatnya Nilai Tambah Hasil dan Daya Saing Produk Perikanan	1. Nilai NTN Sub kategori Perikanan	$\frac{\text{Nilai yang di peroleh nelayan atas usaha penangkapan ikan dalam 1 tahun}}{\text{Biaya yang di keluarkan nelayan untuk usaha penangkapan ikan selama 1 tahun}}$ Jumlah Kebutuhan Pangan	Bidang Perikanan Tangkap	BPS

## INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Nilai PDRB Kategori Perikanan	1. Nilai PDRB Kategori Perikanan	Nilai PDRB atas dasar harga konstan yang di hitung BPS	Bidang Perikanan Budidaya Bidang Perikanan Tangkap	BPS
2	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	1. Jumlah Produksi hasil Perikananpertahun	Jumlah Tonase hasil produksi Perikananper komoditas yang di hasilkan selama 1 tahun	Bidang Perikanan Budidaya Bidang Perikanan Tangkap	Laporan Statistik Bulanan Dinas Perikanan
3	Meningkatnya Nilai Tambah Hasil dan Daya Saing Produk Perikanan	1. Nilai NTN Sub kategori Perikanan	$\frac{\text{Nilai yang di peroleh nelayan atas usaha penangkapan ikan dalam 1 tahun}}{\text{Biaya yang di keluarkan nelayan untuk usaha penangkapan ikanselama 1 tahun}}$ Jumlah Kebutuhan Pangan	Bidang Perikanan Tangkap	BPS

## INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Nilai PDRB sub Kategori Peternakan	1. Nilai PDRB Sub Kategori Peternakan	Nilai PDRB atas dasar harga konstan yang di hitung BPS	Bidang Peternakan Bidang Kesehatan Hewan	BPS
2	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	1. Jumlah Produksi hasil ternak pertahun	Jumlah Tonase hasil produksi ternak per komoditas yang di hasilkan selama 1 tahun	Bidang Peternakan Bidang Kesehatan Hewan	Laporan Statistik Bulanan Dinas KP dan Peternakan
3	Meningkatnya Nilai Tambah Hasil dan Daya Saing Produk Peternakan	1. Nilai NTP Sub kategori peternakan	$\frac{\text{Nilai yang di peroleh peternak atas usaha peternakan dalam 1 tahun}}{\text{Biaya yang di keluarkan peternak untuk usaha peternakan selama 1 tahun}}$	Bidang Peternakan Bidang Kesehatan Hewan	BPS
4	Meningkatnya Ketahanan Pangan	1 Skor Neraca Bahan Makanan (NBM)	Skor NBM di hitung oleh pihak akademisi yang independen dengan menggunakan berbagai komponen dalam perhitungannya	Bidang Ketahanan Pangan	Dinas KP dan Peternakan
5	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	1 Rasio Produksi Pangan di Banding Kebutuhan Pangan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Pangan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Pangan}}$	Bidang Ketahanan Pangan	Lap. Statistik Pertanian
6	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan pangan	1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor PPH di hitung oleh pihak akademisi yang independen dengan menggunakan berbagai komponen dalam perhitungannya	Bidang Ketahanan Pangan	Dinas KP dan Peternakan

**TABEL 4.1**  
**MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan Nilai PDRB Kategori Perikanan	Nilai PDRB Kategori Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	1%	2%	2%	2%	1%	1%	Meningkatkan surplus produksi perikanan serta meningkatkan produksi komoditas hasil perikanan lainnya	Peningkatan mutu intensifikasi perikanan serta optimalisasi penggunaan lahan perikanan	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
													Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan
				Persentase Meningkatnya Produksi Budidaya Perikanan	6%	8%	8%	8%	8%	8%	Penggalian potensi sumberdaya perikanan dengan teknologi tepat guna		Program Pengembangan Budidaya Perikanan
			Meningkatnya Nilai Tambah Hasil dan Daya Saing Produk Perikanan	Nilai NTN	-	102,5	103,25	104	104,5	105,25	Penggalian potensi sumberdaya perikanan dengan teknologi tepat guna	Meningkatkan Produksi dan Produksifitas Perikanan dan Kelautan Berbasis Teknologi dan Keunggulan Sumberdaya Lokal	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
													Program Perlindungan Nelayan
													Program Pengembangan SDM Perikanan
													Program Pengembangan Budidaya Perikanan

2.376,68

2.376,68 4.753,36

7.130,04

9.506,72

11.883,40